

MODEL PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN AGRIBISNIS UNTUK MEMBERDAYAKAN PETANI MISKIN BERBASIS MODAL SOSIAL (Studi Pada Petani Miskin di Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang)

Zainur Rozikin

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Merdeka Malang
email: ustadzzen@gmail.com

Abstract

Process reorder point of purchase supplementary materials in the production of cigarettes is one of the main processes in the production chain smoking. Inaccuracy decision will impact the delay in the production process and the cost of storage in the warehouse. Semi-manual system used so far to deal with the reorder point is no longer able to accommodate the increasing number of orders and product variations. Design of decision support systems that integrate multiple parts associated with the reorder point can accommodate inaccuracies reorder point during this process.

Keywords : system information, reorder point, lead time, safety stock

1. PENDAHULUAN

Karakteristik utama pada rumah tangga miskin adalah lemahnya aksesibilitas terhadap kelembagaan-kelembagaan yang ada di sekelilingnya, terutama terhadap kelembagaan ekonomi dan penyedia informasi. Pada umumnya, lapisan warga miskin menciptakan kelembagaan tersendiri secara eksklusif dan terpisah dengan kelembagaan yang ada. Namun, kelembagaan yang mereka bangun tersebut umumnya berskala sempit, memiliki sumberdaya yang terbatas, serta lemah dalam hubungan antar lembaga (interlinkage institution). Sehingga, masyarakat miskin dicirikan oleh lemahnya jaringan sosial yang terbangun, baik secara horizontal di dalam desa, maupun secara vertikal ke luar desa. Lemahnya akses terhadap jaringan ekonomi umumnya disebabkan karena mereka tidak memiliki persyaratan sosial yang cukup, misalnya lemahnya pendidikan, pengetahuan, dan kemampuan berkomunikasi. Selain itu, juga ditemui kelemahan relasi dengan jaringan vertikal dalam sistem agribisnis. Oleh karena itu perlu dirancang program yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani miskin melalui inovasi pertanian mulai dari tahap produksi sampai pemasaran hasil. Hal ini berarti tidak saja diperlukan peningkatan akses petani terhadap informasi pertanian dan dukungan pengembangan inovasi pertanian, namun juga pemberdayaan petani.

Pemberdayaan petani yang dilakukan salah satunya melalui pengembangan kelembagaan yang salah satu modal dasarnya adalah modal sosial (social capital). Berkaitan dengan konteks

“pengembangan kelembagaan”, modal sosial yang tinggi dicirikan oleh berkembang dan berfungsinya kelembagaan di tengah masyarakat dengan baik. Dengan dasar ini, maka upaya pemberdayaan petani miskin melalui pengembangan kelembagaan, harus didasarkan kepada pemahaman yang utuh terhadap ragam dan sifat modal sosial yang mereka miliki, sehingga rancangan kelembagaan akan menjadi lebih tepat.

Bagaimana bentuk kelembagaan yang dapat dibangun, sangat tergantung kepada pola jaringan yang sudah dibangun sebelumnya di samping kemampuan unsur-unsur sumber daya manusia di dalamnya. Dengan kata lain, modal sosial yang dimiliki masyarakat tersebut merupakan basis utama untuk membangun kelembagaan agribisnis. Dengan mengembangkan kelembagaan yang berbasis kepada sistem nilai dan sosiobudaya setempat, maka berarti membangun suatu fondasi untuk aksi kolektif yang merupakan strategi esensial dalam meningkatkan bargain position dengan pihak luar. Aksi kolektif merupakan senjata utama pada mereka yang memiliki sosial ekonomi lemah.

Untuk mampu merumuskan bagaimana bentuk kelembagaan yang sesuai, maka pemahaman terhadap modal sosial masyarakat merupakan langkah awal yang penting. Pemahaman terhadap modal sosial dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengukur kapabilitas modal sosial yang dimiliki masyarakat tersebut, dengan memfokuskan kepada modal sosial yang dimiliki lapisan petani

miskin di wilayah tersebut. Setelah tergambarkan dengan jelas karakteristik modal sosial masyarakat desa dan kapasitas kelembagaan masyarakat, khususnya pada masyarakat miskin, dibuat opsi model-model pengembangan agribisnis yang sesuai, pada berbagai agroekosistem lahan marjinal. Perpaduan karakteristik modal sosial, kelembagaan masyarakat serta karakteristik jaringan-jaringan sosial yang dimiliki pada petani miskin akan menjadi panduan dalam membuat kelembagaan agribisnis yang sungguh-sungguh dibutuhkan petani miskin sesuai dengan agroekosistemnya, yaitu yang mampu mendorong pemberdayaan ekonomi rumah tangganya dengan efisien.

Bagi Kabupaten Malang dengan jumlah rumah tangga miskin (RTM) sebanyak 154.190 RTM (23,6%), serta sebagian besar angkatan kerja yang bekerja (88,7%), 50,5% diantaranya bekerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, maka kebutuhan akan pemberdayaan petani miskin menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak untuk dilaksanakan. Karena untuk menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat perdesaan pada dasarnya harus memiliki 3 (tiga) komponen yaitu Pertama, pemihakan dan pemberdayaan masyarakat, kedua pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan di daerah yang mengembangkan peran serta pemerintah dan ketiga terjadinya modernisasi melalui pemantapan pada perubahan struktur ekonomi dan budaya yang bersumber pada peran masyarakat lokal.

Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah menyusun model pengembangan kelembagaan untuk pemberdayaan petani miskin terutama kelembagaan agribisnis dan akses terhadap kelembagaan penyedia informasi teknologi berdasarkan sifat dan bentuk modal sosial khas yang dimiliki

Manfaat Penelitian

Sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan strategis Pemerintah untuk menentukan kebijakan pemanfaatan modal sosial bagi penanggulangan kemiskinan dalam upaya memberdayakan masyarakat, untuk pengembangan ekonomi lokal, sekaligus meningkatkan keberhasilan usaha masyarakat lokal.

Tinjauan Pustaka

1. Modal Social (social capital) sebagai modal dasar pemberdayaan masyarakat miskin

Konsep social capital merupakan sumbangan ahli sosial untuk melengkapi konsep "human capital" yang sudah sangat umum, terutama di kalangan ilmu ekonomi dan pembangunan. Konsep social capital dapat diterapkan untuk upaya pemberdayaan masyarakat. World Bank memberi perhatian yang tinggi dengan mengkaji peranan dan implementasi social capital khususnya untuk pengentasan kemiskinan di negara-negara berkembang. Paham yang dikembangkan oleh World Bank dengan menggunakan SC didasari oleh asumsi berikut (World Bank, 1988): (1) Social capital berada dalam seluruh keterkaitan ekonomi, sosial, dan politik; dan meyakini bahwa hubungan sosial (social relationships) mempengaruhi bagaimana pasar dan negara bekerja. Sebaliknya, pasar dan negara juga akan membentuk bagaimana social capital di masyarakatnya. (2) Hubungan yang stabil antar aktor dapat mendorong keefektifan dan efisiensi baik perilaku kolektif maupun individual. (3) Social capital dalam satu masyarakat dapat diperkuat. Untuk itu dibutuhkan dukungan sumber daya tertentu. (4) Agar tercipta hubungan-hubungan sosial dan kelembagaan yang baik, maka anggota masyarakat mesti mendukungnya.

Bagaimana mengukur social capital? Ada dua pendekatan untuk mengukurnya. Kita dapat melakukan sensus dengan menghitung jumlah grup atau kelompok sosial yang ada dan keanggotaan grup dalam suatu masyarakat. Dan kedua, dapat juga dengan pendekatan survey, dengan mengukur derajat kepercayaan dan daya kohesi dalam masyarakat (level of trust and civic engagement). Social capital dapat dipahami pada level mikro melalui studi kasus. Dalam hal ini, dapat kita pelajari peranannya dalam memfungsikan keteraturan sosial (social order) bersama-sama dengan perasaan bersama dan sikap berbagi (sense of belonging and shared behavioral norms). Sebagian ahli menganalogkan SC sebagai "sinergi" yang dimiliki masyarakat tersebut. Masyarakat yang bersinergi tinggi adalah masyarakat yang bekerjasama dengan kuat, sementara masyarakat bersinergi rendah cenderung individualistis

2. Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan

Cook (1994) menyatakan pembangunan masyarakat merupakan konsep yang berkaitan dengan upaya peningkatan atau pengembangan masyarakat menuju kearah yang positif. Subejo dan Supriyanto (2004) memaknai pemberdayaan masyarakat sebagai "upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat local dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui collective action dan networking sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial". Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang.

3. Pengembangan kelembagaan sebagai bentuk strategi dalam pemberdayaan

Pengembangan kelembagaan merupakan suatu bentuk pemberdayaan. Dengan mengembangkan kelembagaan yang berbasis kepada sistem nilai dan sosiobudaya setempat, maka berarti membangun suatu fondasi untuk aksi kolektif yang merupakan strategi esensial dalam meningkatkan bargain position dengan pihak luar. Aksi kolektif merupakan senjata utama pada mereka yang memiliki sosial ekonomi lemah. Menurut Norman Uphoff (1986), dikenal dua pendekatan utama dalam pengembangan kelembagaan: yaitu secara individual dan keorganisasian. Pendekatan individual adalah dengan mengintroduksi pengetahuan, serta peningkatan kesadaran dan perilaku kepada masing-masing individu. Sedangkan secara keorganisasian adalah dengan melalui rekayasa sosial dengan memfokuskan pada aspek perubahan peran-peran, struktur, dan prosedur. Perubahan secara individual selama ini sering dijadikan pendekatan utama, berupa pelatihan-pelatihan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan petani.

Di kalangan ahli ilmu ekonomi berkembang apa yang disebut dengan "ekonomi kelembagaan". Menurut Mubyarto (2005), pada prinsipnya ilmu ekonomi kelembagaan

memperhatikan perbedaan-perbedaan budaya di masyarakat yang dipelajarinya. Lebih jauh, menurut Douglass C. North (1993), kelembagaan ekonomi dibentuk oleh aturan-aturan formal (formal constraints) berupa rules, laws, dan constitutions; dan aturan informal (informal constraints) berupa norma, kesepakatan, dan lain-lain. Seluruhnya merupakan penentu bagaimana terbentuknya struktur masyarakat dan kinerja ekonominya yang spesifik.

4. Pengembangan Kelembagaan Secara Struktural dan Kultural

Ada dua jalan utama bagaimana kelembagaan terbentuk, yaitu melalui aspek kelembagaan atau melalui aspek keorganisasian. Jalan pertama terjadi pada kelembagaan-kelembagaan yang bersifat pokok dan seolah tumbuh dengan sendirinya (*crescive institution*) (Uphoff, 1986), sedangkan jalan kedua arena adanya kebutuhan yang dirasakan (*enacted institution*).

Untuk kelembagaan yang terbentuk melalui jalan kedua, yaitu dengan membangun lebih dahulu strukturnya, umum dijumpai pada kelembagaan yang diintroduksi dari luar, misalnya kelompok tani dan koperasi.

2. METODE PENELITIAN

Rancangan kegiatan

Kegiatan ini terdiri atas dua komponen, yaitu penelitian dan action program, yang terangkum dalam pendekatan "penelitian berperan serta" (*participant observation*).

Metode kegiatan

Pada prinsipnya, metode yang digunakan berada dalam konteks penelitian berperan serta (*participant observer*), yaitu mempelajari kondisi lapangan untuk memilih aksi langsung, serta sebaliknya belajar dari aksi yang dilakukan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara administratif Kecamatan Ngantang Malang terbagi atas 13 Desa. Secara geografis, letak semua desa di Kecamatan Ngantang adalah di lereng kecuali Desa Ngantru, Banturejo dan Desa Kaumrejo yang di dataran. Di Kecamatan Ngantang sebagian besar lahan yang ada berupa lahan kering yaitu sebesar 13.526 Ha 91,5 persen. Sedangkan untuk lahan sawah hanya sebesar 8,5 persen (1.254 Ha).

2 . Potensi Sumber Daya Manusia

Kecamatan Ngantang Malang tahun 2008 berpenduduk sebesar 58.015 jiwa. Dengan luas Kecamatan sebesar 147,80 Km² Kepadatan penduduk kurang lebih 363 jiwa per kilometer persegi

Keluarga Miskin

Keluarga miskin di Kecamatan Ngantang relatif masih cukup besar. Pada tahun 2008 jumlah keluarga miskin di Kecamatan Ngantang sebesar 7.150 keluarga atau 38,5 persen dari jumlah seluruh keluarga yang ada. Meskipun terjadi penurunan dalam persentase keluarga miskin yang sebelumnya 42,3 persen, fakta ini cukup mengkhawatirkan karena angka kemiskinannya cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa dampak dari krisis ekonomi masih sangat dirasakan oleh banyak keluarga. Dengan demikian perlu dilakukan upaya untuk dapat menekan pertumbuhan penduduk miskin tersebut

Pendidikan

Ditinjau dari aspek pendidikan, sebagian besar masyarakat di Kecamatan Ngantang berpendidikan rendah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.8. Masyarakat dengan tingkatan pendidikan tamat SD/MI 31,9 persen. Sedangkan yang tidak tamat SD/MI 20,5 persen bahkan masih banyak penduduk usia 10 tahun ke atas yang buta huruf 15,7 persen.

Ketenagakerjaan

Masalah pengangguran merupakan salah satu isu penting dalam pembangunan nasional. Jumlah Pengangguran di Desa Pagersari tahun 2008 sebanyak 441 orang. Jumlah tersebut sebagian besar berasal dari keluarga miskin yaitu 88,73 persen dan 15,46 persen dari jumlah penduduk Desa Pagersari serta 50,87 persen dari jumlah keluarga. Meskipun jumlah pengangguran tidak terlalu besar, namun hal ini perlu mendapatkan perhatian serius guna mencari jalan keluar dari masalah klasik agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja sebagai TKI sebanyak 139 orang dengan distribusi di negara Malaysia 135 orang dan Singapura sebanyak 4 orang.

Kondisi Sosial Budaya di Desa Pagersari

Masyarakat Desa Pagersari semuanya adalah dari Etnis Jawa dan sebagian besar beragama Islam dan hanya 2 orang yang beragama kristen. Tempat peribadatan yang tersedia sebanyak 14 buah dengan rincian adalah masjid sebanyak 5

buah dan surau 9 buah. Berkaitan dengan hubungan sosial antar warga dalam mengatasi masalah bersama seperti untuk pembangunan/perbaikan jalan, gang, saluran air, irigasi, masjid, mushola dan majlis taklim warga selalu siap untk melakukan kerjasama/gotong royong.

Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di Desa Pagersari mulai dari tingkat TK sampai dengan SMP, masing-masing untuk TK 1 buah, SD 2 buah dan SMP 1 buah. Jarak seluruh sekolah tersebut dekat dan semua berada di sekitar lingkungan pemukiman sehingga dapat ditempuh kurang dari 15 menit dengan memakai kendaraan bermotor atau berjalan kaki

Sarana Kesehatan

Di desa Pagersari sarana kesehatan yang ada hanyalah tempat praktek bidan, posyandu dan polindes. Jumlah tenaga kesehatan yang ada yaitu bidan, dukun bayi terlatih dan dukun bayi belum terlatih.

Sarana Ekonomi dan informasi

Di desa Pagersari sarana ekonomi yang ada adalah warung sebanyak 5 buah dan cukup mudah untuk dijangkau. Sedangkan satu-satunya media komunikasi umum yang tersedia hanyalah 1 wartel.

Fasilitas Jalan dan air bersih

Fasilitas jalan yang ada Di desa Pagersari adalah aspal/lapen kondisi sedang sebanyak 4,5 Km², macadam 2 Km² dan jalan tanah 0,5 Km². Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih warga mendapatkan dari sumber mata air yang jaraknya agak jauh kecuali bagi warga yang berada di sekitar mata air.

Ketersediaan Kelompok

Kelompok yang tersedia masyarakat relatif banyak dan beragam, mulai dari kelompok keagamaan yaitu majlis taklim, kelompok tani, kelompok arisan, kelompok parpol, kelompok usaha ternak, kelompok tari, dan kelompok olahraga.

4. REFERENSI

- [1] Agusta, Ivanovich. 2002. Metodologi Evaluasi Program Pemberdayaan. Makalah Seminar dalam Seminar Nasional ISI, tanggal 28-29 Agustus 2002. Bogor

- [2] Cernea, Michael M (ed). 1988. Mengutamakan Manusia di Dalam Pembangunan: Variabel-Variabel Sosiologi di Dalam Pembangunan Pedesaan. Publikasi Bank Dunia. UI-Press, Jakarta. Buku asli: *“Putting People First”*.
- [3] Coleman, J. 1988. “Social Capital in the Creation of Human Capital.” *American Journal of Sociology* 94. (Supplement) S95-S120.
- [4] Coleman, J. C. 1994. *Foundation of Social Theory*. Harvard University Press, Cambridge and London. Christiaan Grootaert dan Thierry van Bastelaer. eds. 2002. Understanding and Measuring Social Capital: A Multidisciplinary Tool for Practitioners. The World Bank, Washington DC.
- [5] Douglass C. North 1993. Prize Lecture: Lecture to the memory of Alfred Nobel, December 9, 1993. <http://nobelprize.org/economics/laureates/1993/north-lecture.html>, 27 April 2005. Gatekeeper Series SA31. IIED, London.
- [6] Grootaert, C. 1997. “Social Capital: The Missing Link?” in *Expanding the Measure of Wealth: Indicators of Environmentally Sustainable Development*. Environmentally Sustainable Development Studies and Monographs Series No. 7. Washington, DC: The World Bank.
- [7] <http://info.worldbank.org/etools/bspan/PresentationView.asp?PID=936&EID=482>, 11 Mei 2005
- [8] Koentjaraningrat. 1997. Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- [9] Mubyarto. 2005. Pengajaran Ilmu Ekonomi di Indonesia. Artikel. www.ekonomipancasila.org/artikel, 11.htm. 7 Maret 2005.
- [10] Norman Uphoff. 1986. hal. 8. Uphoff, Norman. 1986. Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook With Cases. Kumarian Press. Norman Uphoff. 1992. Local Institutions and Participation for Sustainable Development.
- [11] Nurmanaf, A.R. dkk. 2002. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Dalam Perspektif pembangunan Partisipatif di Wilayah Agroekosistem Marjinal. Laporan Penelitian: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- [12] Oleynik, A. 2005. Introduction to Institutional Economics and Its Applications to the Studies of Post-Soviet Economies. Topic 1. Introduction to Institutional Analysis. Classification of institutional concepts. <http://www.nsu.ru/ippk/lab/in/profolee.htm>, 27 April 2005.
- [13] Pakpahan, Agus. 1989. Kerangka Analitik untuk Penelitian Rekayasa Sosial: Perspektif Ekonomi Institusi. Prosiding Patanas: Evolusi Kelembagaan Pedesaan di Tengah Perkembangan Teknologi Pertanian. Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Bogor.
- [14] Payne, Malcom. 1997. Modern Social Work Theory. Second Edition. MacMillan Press Ltd., London. Hal. 266. Social Capital, Empowerment, and Community Driven Development. <http://info.worldbank.org/etools/bspan/PresentationView.asp?PID=936&EID=482>, 11 Mei 2005.

- [15] Putnam, R. 1993. "The Prosperous Community — Social Capital and Public Life." *American Prospect*(13): 35-42. (Dalam The World Bank. 1998.
- [16] Sarman, Muchtar (ed). 1998. Dimensi Kemiskinan: Agenda Pemikiran Sajogyo. Kata Pengantar Mubyarto. Pusat P3R-YAE. Bogor. Edisi terbatas. 121 hal. Hal. 85.
- [17] Scott, James C. 1994. Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara. LP3ES, Jakarta. 369 hal.
- [18] Soekanto, Soerjono. 1999. Sosiologi: Suatu Pengantar. Edisi Baru, Cet. 28. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [19] Soemardjan, Selo dan S. Soemardi. 1964. Setangkai Bunga Sosiologi (Kumpulan Tulisan). Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- [20] Subejo. 2004. Peranan Social Capital dalam Pembangunan Ekonomi: Suatu Pengantar untuk Studi Social Capital di Pedesaan Indonesia. *Majalah Agro Ekonomi* Vol. 11 No.1 Juni 2004. hal 79.
- [21] Syahyuti. 2003. "Bedah Konsep Kelembagaan: Strategi Pengembangan dan Penerapannya dalam Penelitian Pertanian". Dicitak oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- [22] World bank. 2005. Social Capital, Empowerment, and Community Driven Development.
- [23] World Bank.1998. "The Initiative on Defining, monitoring and Measuring Social Capital: Text of Proposal Approved for Funding". *Social Capital Initiative Working Paper No. 2*. The World Bank,